



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 April 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIT KERJA : INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA
SUB UNIT KERJA : FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SEGER RIYADI
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM
3. NHK : 434294

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 407 m²/200 m² di SUKOHARJO, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 500.000.000
2. Tanah Seluas 2556 m² di SUKOHARJO, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 1.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 177.500.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI TRUCK Tahun 1975, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
3. MOBIL, DAIHATSU XENIA MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
4. MOTOR, YAMAHA NMAX 2DP-R A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 28.500.000
5. MOTOR, HONDA SCOPY F1CO2N28LO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 19.500.000
6. MOTOR, HONDA VARIO A1FO2N37M1 A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 20.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 190.000.000

- D. SURAT BERHARGA** Rp. ---
- E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 4.000.000
- F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

**Sub Total**

Rp. 1.871.500.000

III. HUTANG

Rp. 317.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.554.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi penuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **21 April 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.